



Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
JURNAL LEDALERO

<http://ejournal.stfkledalero.ac.id/index.php/JLe/index>



Teologi Bisnis: Korporasi, Masalah HAM, dan Mandat Penciptaan-Penyelamatan

Winibaldus S. Mere

Nanzan University, Japan

pos-el: merestef@ic.nanzan-u.ac.jp

Diajukan: 07-04-2021; Direview: 08-04-2021; Diterima: 27-04-2021; Dipublis: Juni 2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v20i1.232.83-99>

Abstract: *This article aims at framing a theological understanding about business in the context of the impacts of corporate conducts on human rights. The relevance of this theological understanding arises from the need to bring a true liberation (salvation) in a contradictory reality: human suffering due to human rights violation in business activities on the one hand and ineffectiveness of legal and moral instruments, as well as weak individual and collective commitments of government and business actors in dealing with that problem on the other hand. Using “creation, fall and redemption” approach as basis for biblical worldview to understand issues related to business and its social impacts, this article highlights the necessity of internal factors as foundational values that can bring about a true commitment to do business not only based on legal and moral norms as a mere socio-political consensus, but also as an expression of a socio-spiritual obedience to and faith in God. Because, more than just accumulating commercial benefits, business has mission to realize God’s work for human salvation in this world. Business actors as individuals and organization (corporation) become God’s collaborators – mainly in their nature as bearer of the Image of God and mandate of creation - to materialize the works of salvation in this world through their activities in the production and distribution of goods and services that respect human rights.*

Keywords: teologi bisnis, korporasi, hak asasi manusia, gambaran Allah, mandat penciptaan, penebusan, kapitalisme liberal

Pendahuluan

Salah satu aspek yang disoroti dalam Simposium Internasional 50 Tahun Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero adalah kemungkinan untuk menghasilkan teologi sektoral, seperti teologi ekonomi. Aspek ini ditanyakan oleh peserta menanggapi presentasi tentang teologi kontekstual oleh P. Paul Budi Kleden. Dijawab oleh P. Paul Budi bahwa “hal itu mesti mungkin.” Menurutnya, yang sudah banyak dikembangkan adalah aspek moral, khususnya etika Kristiani dalam berekonomi. Karena itu perlu dikembangkan aspek teologisnya. Hal ini bisa dimulai dengan menemukan konsep teologis tentang “manusia, yang sosial dan kesejahteraan”. Namun juga perlu diwaspadai dan dibedakan dari cara berteologi yang dikenal di beberapa gereja sebagai teologi kesuksesan atau teologi kemakmuran. Karena menurut P. Paul Budi, narasi teologi ini secara gampang melihat kesuksesan, khususnya kesuksesan ekonomis, secara otomatis sebagai “tanda keterpilihan dan keberkatan”.¹

¹ Diskusi tentang kemungkinan berteologi ekonomi diakses dari YouTube, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, “Part 3 Simposium Internasional STFK Ledalero (Dr. Paul Budi Kleden)” <<https://www.youtube.com/watch?v=zTPAMnQPbfE>>

Bagi penulis, diskusi singkat di atas menyentuh pergulatan intelektual pribadi beberapa tahun belakangan ini tentang urgensi teologi ekonomi pada umumnya dan teologi bisnis pada khususnya. Permenungan intelektual ini muncul dalam konteks peran penulis sebagai akademisi yang meneliti tanggung jawab moral dan akuntabilitas hukum korporasi, sekaligus juga sebagai seorang pastor yang dibekali wawasan teologis dalam karya perutusan gereja. Dalam menjalankan dua peran ini penulis berhadapan dengan realitas kontradiktif: penderitaan karena pemerkosaan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam aktivitas bisnis di satu pihak dan lemahnya perangkat hukum dan moral, serta rapuhnya komitmen individual dan kolektif pemerintah dan aktor bisnis untuk menangani masalah itu di pihak lainnya. Adanya ketragisan realitas kemanusiaan yang menuntut karya pembebasan yang nyata di satu pihak dan ketidakefektifan perangkat legal dan moral di pihak lainnya. Realitas kontradiktif ini membangkitkan kesadaran akan perlunya fundasi nilai dan komitmen berbisnis yang tidak hanya berbasis pada norma hukum dan moral sebagai sebuah konsensus sosial politik semata, tetapi juga sebagai ekspresi keberimanannya yang benar pada yang Ilahi. Karena, lebih dari hanya sekadar mengakumulasi keuntungan ekonomis, bisnis juga mempunyai misi luhur untuk menciptakan kemakmuran bersama dan kesempurnaan (keselamatan) bagi manusia dan dunia.

Inilah aspek teologis dari bisnis yang akan diulas dalam tulisan ini. Sembari menempatkan masalah HAM dalam aktivitas bisnis sebagai lokus analisis, tulisan ini akan menyoroti arti dan peran bisnis sebagai institusi dan aktivitas ekonomis dalam konteks pemahaman teologis tentang karya keselamatan Allah di dunia ini, mulai dari proses penciptaan manusia dan dunia (*creation*), kejatuhan manusia ke dalam dosa (*fall*) dan proses penyelamatan oleh Allah sendiri lewat Kristus (*redemption*).² Sebagai latar belakang pemahaman, akan dipaparkan terlebih dahulu alasan adanya urgensi untuk mengembangkan teologi bisnis dalam konteks keprihatinan terhadap masalah HAM dalam aktivitas bisnis. Pada bagian kedua akan ditampilkan sistem ekonomi politik global, khususnya ekonomi neoliberal kapitalis, yang ditenggarai sebagai akar permasalahan bagi realitas kontradiktif di atas. Bagian ketiga akan mengangkat fenomena berteologi dalam spirit keuntungan material versi neoliberal kapitalis. Bagian keempat akan memaparkan sketsa teologi bisnis dalam konteks mandat penciptaan dan penyelamatan oleh Allah.

Gap Akuntabilitas Korporasi dan Urgensi Teologi Bisnis

Ide tentang urgensi teologi sektoral dalam bidang bisnis muncul pertama kali ketika penulis sedang menjalani program studi doktoral dalam bidang hukum HAM internasional dengan fokus penelitian pada sektor Bisnis dan HAM. Awalnya bisnis dan berbagai masalah HAM dipelajari sebagai bidang ilmu yang sama sekali terpisah dari teologi. Hampir tidak pernah terpikirkan tentang keterkaitan antara keduanya. Sama halnya hampir tidak pernah terpikirkan keterkaitan antara teologi dan bisnis ketika penulis sedang mempelajari teologi pada tahap persiapan menuju imam. Teologi dipelajari dalam ranah akademis yang sama sekali terpisah dari bisnis. Karena sepiantas, substansi dan tujuan keduanya dianggap sangat berbeda, malah terkesan bertentangan. Bisnis dipahami sebagai usaha untuk mengakumulasi keuntungan material. Sementara teologi dilihat sebagai diskursus intelektual tentang berbagai urusan dengan yang ilahi. Dalam pertentangan semacam ini, teologi dianggap sebagai sesuatu yang kudus, sementara bisnis dilihat sebagai sesuatu yang profan dan tak

² Ulasan ini mengikuti pendekatan "Creation, Fall and Redemption" (tema-tema utama kitab suci) yang digunakan oleh Walsh and Middleton sebagai dasar pemetaan pandangan biblis tentang berbagai masalah social. Brian J. Walsh and Richard J. Middleton, *The Transforming Vision: Shaping a Christian Worldview* (Illinois: Intervarsity Press, 1984).

jarang kotor.³ Tetapi pandangan semacam ini perlahan berubah ketika penulis mendalami fenomena meluasnya dampak negatif aktivitas bisnis terhadap HAM dan lemahnya akuntabilitas sosial dan hukum pelaku bisnis dan korporasi. Masalah HAM yang dimaksudkan di sini termasuk masalah lingkungan, karena pengrusakan lingkungan juga menimbulkan berbagai masalah HAM.

Tujuan utama setiap aktivitas bisnis adalah keuntungan finansial. Dasyatnya kekuatan finansial semacam ini berpengaruh besar pada: 1) pembuatan berbagai kebijakan tentang tanggung jawab HAM korporasi oleh pihak eksekutif, 2) penyusunan regulasi tentang bisnis dan HAM oleh pihak legislatif dan 3) keputusan peradilan oleh pihak yudikatif dalam perkara kasus pemerkosaan HAM yang melibatkan pelaku bisnis dan korporasi. Amat sering kebijakan pemerintah pada level internasional and domestik lebih berpihak kepada bisnis dari pada perlindungan HAM dalam berbisnis.⁴ Kebijakan atas kegiatan pertambangan yang ditanggapi dengan perlawanan oleh berbagai elemen masyarakat di Flores dan Lembata adalah salah satu contoh dari tendensi ini. Sementara itu, perangkat regulasi pada level internasional dan nasional tentang tanggung jawab HAM korporasi sering sulit disepakati karena kuatnya lobi pelaku bisnis dalam pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah. Demikian pula, ketika ada perkara yang melibatkan pelaku bisnis atau korporasi atas tuduhan masalah HAM dalam aktivitas bisnis, amat sering kasusnya diabaikan atau berakhir dengan pembebasan pelaku bisnis dan korporasi.⁵

Untuk memperbaiki lemahnya efektivitas perangkat legal, telah diusahakan berbagai Prinsip Dasar Panduan tentang Bisnis dan HAM oleh organisasi internasional dan regional.⁶ Sementara itu, sebagian besar korporasi juga telah menyusun Pedoman Etika dan Prilaku (*Code of Conduct*) berkaitan dengan HAM dalam kegiatan bisnis. Tetapi semuanya bersifat sukarela. Sehingga ketika tuntutan atas penghormatan dan perlindungan HAM bertentangan dengan tuntutan keuntungan bisnis, semua norma tak mengikat itu amat sering hanya menjadi pajangan pada tatanan kebijakan cuma demi keperluan relasi publik,⁷ tanpa aplikasi nyata pada perlindungan HAM dalam aktivitas bisnis.

Kenyataan bahwa kebijakan atau norma hukum dan moral sebagai faktor *eksternal* sebagaimana diuraikan di atas kurang efektif untuk melindungi HAM dalam aktivitas bisnis, maka diperlukan faktor *internal* sebagai tatanan nilai yang menjiwai perilaku pelaku bisnis dan korporasi. Masalah HAM dan berbagai masalah sosial lainnya dalam aktivitas bisnis terjadi karena krisis nilai dan kebajikan yang bersifat individual (pelaku bisnis) dan institusional (korporasi).⁸ Hanya ketika nilai dan kebajikan ini dipahami dan diinternalisasikan agar bisa menginspirasi perilaku pribadi (pelaku bisnis) dan institusi (korporasi), tuntutan perlindungan HAM dalam berbisnis akan memiliki implikasi

³ Bdk. Jeremy Kidwell & Sean Doherty (eds.), *Theology and Economics: A Christian Vision of the Common Good* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 1-6.

⁴ Pada level internasional, tendensi ini bisa terlihat dalam kesepakatan and kebijakan investasi (Bilateral Investment Agreements). Bdk. Winibaldus S. Mere, "Recent Trend Toward a Balanced-Business and Human Rights Responsibility in Investment Treaties and Arbitrations", *International Journal on Human Rights and Business*, 4: 2, 2020, hlm. 1-16.

⁵ Kecuali beberapa kasus masalah HAM oleh korporasi di pengadilan di Inggris (*Chandler v. Cape PLC*, 2011), dan Belanda (*Akpan v. Royal Dutch Shell PLC*, 2013), tidak ada satupun dari sekitar 40 lebih kasus yang dibawa ke pengadilan di Amerika Serikat bisa mencapai keputusan final.

⁶ Seperti, Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, *UN. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev. 2* (13 August 2003); Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework, *UN. Doc A/HRC/17/31* (21 March 2011).

⁷ Peter Muchlinski, "Implementing the New UN Corporate Human Rights Framework: Implications for Corporate Law, Governance and Regulation", *Business Ethic Quarterly*, 22:1, 2012, hlm. 156.

⁸ Winibaldus S. Mere, "Socio-Spiritual Aspect of Business", *The Japan Mission Journal*, 75: 2, 2019, hlm. 124-134.

yang nyata. Hal ini tentu meniscayakan pemahaman yang benar tentang berbagai aspek fundamental dalam aktivitas bisnis, seperti pemahaman tentang 1) manusia yang untuknya bisnis diselenggarakan, 2) kerja dan keuntungan yang dihasilkan dalam aktivitas bisnis, dan 3) keberadaan korporasi sebagai institusi yang misi utamanya lebih dari hanya sekedar mengakumulasi keuntungan material, tapi juga melayani Allah dalam menyempurnakan manusia dan dunia. Bila pemahaman yang benar tentang berbagai aspek dasar bisnis ini menginspirasi berbagai kebijakan nyata pelaku bisnis dan korporasi, bisnis akan menjadi misi keselamatan yang nyata di dunia ini.

Bagi orang beriman, teologi bisa menjadi salah satu sumber utama pemahaman yang benar tentang berbagai aspek bisnis. Secara khusus teologi membantu pelaku bisnis untuk memahami dimensi spiritual dari korporasi dan berbagai aktivitas bisnis yang dilakukannya dengan menempatkan tujuan bisnis dalam konteks karya penciptaan dan penyelamatan manusia dan dunia oleh Allah. Karena tanpa pemahaman tentang citra Allah sebagai dasar martabat manusia, nilai kemanusiaan bisa direduksi setaraf perbudakan dalam pengakumulasian keuntungan. Tanpa pemahaman tentang aktivitas bisnis sebagai partisipasi dalam karya keselamatan Allah, horizon tujuan bisnis bisa dipersempit sebatas pengakumulasian keuntungan material, sementara aspek sosio-spiritual bisnis sebagai sarana solidaritas demi kebaikan bersama akan begitu saja terabaikan.⁹ Dalam konteks ini, pengembangan teologi bisnis menjadi sangat urgen.

Efek Ekonomi Neoliberal Kapitalis sebagai Konteks Pijakan Teologi Bisnis

Semakin menguatnya tuntutan akan tanggung jawab sosial korporasi, termasuk perlunya teologi bisnis, tidak terlepas dari keprihatinan atas tujuan dan cara kerja bisnis berdasarkan doktrin ekonomi neoliberal kapitalis sebagai sistem ekonomi dunia yang dominan sejak tahun 1970-an. Doktrin ekonomi politik ini beranggapan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan mengedepankan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individual dalam struktur kelembagaan yang dicirikan oleh kuatnya hak milik pribadi dan pasar (perdagangan) bebas.¹⁰ Korporasi, khususnya korporasi transnasional dan institusi keuangan internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank dunia, menjadi pengemudi utama sistem ekonomi neoliberal. Sejak awal, doktrin ekonomi neoliberal cenderung mengesampingkan tanggung jawab sosial korporasi. Salah satu pelopor utama ekonomi neoliberal, Milton Friedman, pernah menulis, “There is one and only one social responsibility of business — to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game.”¹¹ Baginya, tidak ada tanggung jawab sosial korporasi selain mengakumulasi keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham perusahaan. Karena itu, menurutnya, korporasi hakikatnya tidak memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas, tetapi hanya kepada pemilik dan pemegang saham. Karena itu, masalah sosial, seperti masalah HAM, hakikatnya tidak menjadi perhatian dalam mengakumulasi keuntungan bisnis, sejauh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan aturan main yang berlaku.

Masalahnya, aturan main yang dibuat pada level nasional dan internasional dan mekanisme akuntabilitas amat sering terkungkung dalam pengaruh dan intervensi korporasi agar sejalan dengan kepentingannya.¹² Kuatnya pengaruh finansial dan politis pelaku bisnis menjadikan banyak regulasi

⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, AAS 83 (1991), para. 35.

¹⁰ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 2.

¹¹ Milton Friedman, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits”, *New York Times Magazine*, 13 September 1970, hlm. 32-34.

¹² Sharon Beder, *Suited Themselves: How Corporations Drive Global Agenda* (London: Earthscan, 2006).

dan mekanisme akuntabilitas tak berdaya. Selain itu, sistem ekonomi neoliberal menempatkan supremasi bisnis dan mengutamakan kompetisi pasar bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan. Tentu saja kompetisi berdasarkan aturan main yang lebih memihak korporasi akan lebih menguntungkan korporasi. Dalam kondisi semacam ini, sistem ekonomi neoliberal mensyaratkan keniscayaan penguatan hak milik pribadi, peswastaan berbagai sektor ekonomi milik negara, deregulasi harga, pemangkasan anggaran untuk kesejahteraan sosial, pelonggaran aturan hukum ketenagakerjaan dan hanya mengizinkan intervensi terbatas pemerintah dalam urusan bisnis.¹³

Dengan posisi yang menguntungkan seperti ini, filosofi tata kelola korporasi pun kian mengarah kepada prinsip nilai pemegang saham (*shareholder value*), mengabaikan prinsip nilai pemangku kepentingan (*stakeholder value*).¹⁴ Itu berarti takaran keberhasilan bisnis amat ditentukan oleh seberapa banyak aktivitas bisnis memperkaya pemilik dan pemegang saham korporasi (*shareholders*), tak peduli apa dampaknya bagi masyarakat luas (*stakeholders*). Akibatnya dalam praktek, ekonomi neoliberal mengutamakan 1) pasar dari pada pemerintah, 2) ekonomi insentif dari pada norma sosial atau budaya, 3) kewirausahaan individual dari pada berbagai tindakan kolektif dalam aktivitas ekonomi.¹⁵

Ini tidak berarti bahwa pasar, ekonomi insentif dan kewirausahaan tidak penting. Tidak bisa dipungkiri, semua sektor ekonomi ini berperan krusial dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan. Sebagaimana dengan sangat tepat dipaparkan oleh Joseph Stiglitz (pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi), semua pendekatan ekonomis, termasuk peswastaan, bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia hanya bila semua sarana itu digunakan secara efektif oleh korporasi untuk menciptakan barang dan jasa dengan harga yang murah bagi konsumen tanpa mengkompromikan penghormatan terhadap HAM.¹⁶

Keseimbangan dalam aktivitas bisnis semacam ini sangat penting. Karena prioritas pada pasar bebas dalam sistem ekonomi neoliberal telah menjadi salah satu faktor utama terjadinya krisis ekonomi, masalah lingkungan dan pelebaran kesenjangan sosio-ekonomis antara kelompok masyarakat dan negara.¹⁷ Tata kelola bisnis yang lebih mengutamakan nilai pemegang saham (*shareholder values*) dari pada nilai pemangku kepentingan (*stakeholder values*) berpengaruh pada cara korporasi merumuskan efek resiko bisnis yang hanya terfokus pada kepentingan para pemegang saham (pihak internal) dari pada urusan HAM para pemangku kepentingan (pihak eksternal). Perdagangan bebas pada taraf tertentu telah memungkinkan perusahaan transnasional mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah di berbagai negara berkembang dan terbelakang. Deregulasi harga pasar telah memungkinkan terjadinya manipulasi permainan harga dan pengalokasian dana berlebihan untuk gaji dan bonus bagi para eksekutif korporasi atas penderitaan dan kerja keras ratusan juta pekerja dan karyawan. Terbatasnya intervensi pemerintah amat sering jadi peluang bagi korporasi untuk melaksanakan kegiatan bisnis tanpa akuntabilitas dan kontrol yang memadai.¹⁸ Yang paling mencengangkan, mentalitas memperkaya diri tanpa kontrol, minimnya norma hukum dan absennya

¹³ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, hlm. 2.

¹⁴ Gerald Charreaux and Philippe Desbrières, "Corporate Governance: Stakeholder Value Versus Shareholder Value", *Journal of Management & Governance*, 5: 2, 2001, hlm. 107–128.

¹⁵ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, hlm. 2.

¹⁶ Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontent* (London: Penguin, 2002), hlm. xi.

¹⁷ Manfred Nowak, *Human Rights or Global Capitalism: The Limits of Privatization* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017), hlm. 1.

¹⁸ David M. Kotz, *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015).

rasa keadilan semacam ini berimbas pada krisis ekonomi 1997/1998 and 2007/2008.¹⁹ Akibatnya hak-hak sosial dan ekonomi sebagian besar masyarakat global terabaikan karena banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, perumahan dan akses atas sarana kesehatan akibat krisis ekonomi ini.

Ketakberdayaan negara-negara miskin dan berkembang akibat krisis ekonomi ini malah digunakan oleh badan moneter internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sistematisasi pemindahan sebagian mandat atas urusan ekonomi negara dari pemerintah (negara) ke korporasi. Lewat kebijakan penyesuaian struktural (*structural adjustment*), negara-negara peminjam dana ke lembaga keuangan internasional ini dipaksakan untuk melakukan penyesuaian struktural atas berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam negeri agar lebih sesuai dengan sistem ekonomi neoliberal kapitalis.²⁰ Ini termasuk liberalisasi sektor-sektor ekonomi yang vital bagi masyarakat dan peswastaan berbagai sektor ekonomi dan pembangunan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan dikuasai oleh negara. Kondisi ini menjadi peluang bagi korporasi transnasional untuk menguasai berbagai sektor ekonomi yang vital dan mengambil alih sebagian besar saham perusahaan-perusahaan domestik. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah seperti air minum, asuransi kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur dan lain-lainnya, diubah menjadi sektor yang bisa dimiliki oleh swasta sebagai obyek komoditi yang diperebutkan dalam ruang pasar bebas.²¹

Selain itu, demi menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di sektor-sektor itu, pemerintah melonggarkan atau malah mengabaikan berbagai norma HAM dalam kesepakatan investasi (*investment agreement*).²² Sebagai akibatnya, hak para pekerja untuk berorganisasi, hak atas upah yang wajar, hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, hak kolektif masyarakat seperti kepemilikan tanah dan kebudayaan seputar hutan yang memiliki nilai sakral, larangan untuk mempekerjakan anak-anak di bawah umur dan masih banyak HAM lainnya amat sering terabaikan dalam kesepakatan kerja sama bisnis. Karenanya, sebagaimana dilukiskan oleh Easterly, setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan kebijakan penyesuaian struktural, “corporate [multinational corporations] profits go up, but so do poverty and suffering” (keuntungan korporasi meningkat, begitu pula kemiskinan dan penderitaan publik).²³

Menjadi jelas bahwa sistem ekonomi neoliberal kapitalis yang dibanggakan oleh sebagian kalangan sebagai sistem ekonomi terbaik demi menciptakan kemakmuran,²⁴ dalam kenyataan justru menjadi malapetaka bagi sebagian kalangan lainnya. Dalam dunia bisnis, kondisi kontradiktif ini menjadi sangat nyata dalam realitas kesenjangan sosial, kemiskinan dan penderitaan akibat pemerkosaan HAM oleh korporasi. Terus menguatnya tuntutan akan tanggung jawab HAM dalam aktivitas bisnis, menjadi bukti nyata adanya realitas jeritan penderitaan dan ancaman terhadap kemanusiaan universal karena ulah korporasi. Sebagaimana diutarakan di atas, realitas penderitaan semacam ini tidak cukup hanya dijawab dengan norma legal dan moral saja, tapi juga norma spiritual

¹⁹ David M. Kotz, “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism”, *Review of Radical Political Economics*, 41: 3, 2009, htm. 305-317

²⁰ The Structural Adjustment Participatory Review International Network, *The Policy Roots of Economic Crisis and Poverty* (Washington DC: SAPRIN, 2002).

²¹ Manfred Nowak, *Human Rights or Global Capitalism*, hlm. 55-99.

²² Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law Second Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 104-108.

²³ William Easterly, “IMF and World Bank Structural Adjustment Programs and Poverty”, in Michael P. Dooley and Jeffrey A. Frankel, (eds.), *Managing Currency Crisis in Emerging Markets* (Chicago: Chicago University Press, 2003), hlm. 362.

²⁴ Bdk. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Men* (New York: Free Press, 2006).

yang didasarkan pada kerangka pemahaman teologis yang benar tentang aktivitas bisnis dalam konteks karya keselamatan universal oleh Allah sendiri. Kerangka pemahaman teologis yang benar tentang bisnis perlu diberi penekanan demi menghindari distorsi penyempitan makna berkat keselamatan hanya dalam bingkai kesuksesan dan kemakmuran material semata sebagai diingatkan oleh P. Paul Budi di atas. Karena sebagaimana akan diuraikan pada sesi berikut, distorsi pemahaman teologis semacam ini justru bisa mengarah kepada pembenaran berbagai bentuk pemerkosaan HAM dan pelembagaan berbagai bentuk penderitaan dan ketidakadilan struktural.

Teologi Kemakmuran dan Privilese Keterberkatan Secara Ekonomis

Teologi kemakmuran, atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan, *prosperity theology*, *prosperity gospel*, *health and wealth gospel*, *gospel of success*,²⁵ sebenarnya berakar pada pandangan ekonomi kapitalis yang coba mengaitkan keberimanan dengan kondisi kesuksesan ekonomis. Penganut teologi ini percaya bahwa kesuksesan ekonomis dan finansial adalah tanda keterberkatan seseorang di hadapan Allah. Kelimpahan berkat ekonomis akan dicapai lewat iman, pewartaan dan donasi bagi karya pelayanan gereja.²⁶ Kemakmuran ekonomis ini menjadi salah satu bagian penting dari perjanjian antara Allah dan manusia mulai dari Adam di taman Eden dan diteruskan kepada Noah, Abraham, para nabi dan murid-murid Yesus.²⁷

Sebagai referensi Biblis, kepada Abraham misalnya, Allah berjanji, “Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya” (Kej 22:17). Penganut teologi kemakmuran beranggapan bahwa janji ini mempertegas kekayaan dan kemakmuran material yang sedang dan akan terus dianugerahkan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kitab Kejadian mencatat, “Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya” ketika pergi dari Mesir ke daerah Negep (Kej 12:1-2). Bahkan karena harta milik Abraham dan Lot sangat banyak, termasuk sapi, domba dan ternak lainnya, daerah tempat tinggal mereka dikatakan tidak cukup untuk menampung semuanya (Kej 12: 5-6). Penganut teologi kemakmuran percaya bahwa kelimpahan material ini akan dianugerahkan juga kepada semua keturunan Abraham.

Allah juga berjanji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, hanya karena Abraham mendengarkan firman-Nya (Kej 12:18). Jadi sebagai imbalan atas ketaatan Abraham, Allah berjanji akan menganugerahkan kemakmuran material kepada keturunannya. Karenanya, dalam konteks perjanjian antara Allah dan manusia, penganut teologi kemakmuran percaya bahwa keterberkatan dalam wujud kekayaan material adalah bukti pemenuhan janji atas keberimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah.

Dalam praktek, keberimanan ini perlu dilengkapi dengan penaburan benih amal (*sowing seeds*) lewat kesetiaan untuk membayar persepuluhan dan donasi. Karena kalau orang mengharapkan untuk menerima berkat, orang itu terlebih dahulu harus memberi dengan menabur benih amal lewat pernyataan iman dan persepuluhan sebagai donasi dari hasil kerjanya. Sebagai imbalan atas pernyataan dan pengalaman iman semacam ini, Allah menganugerahkan kesehatan dan harta material kepada

²⁵ Daniel K. Bediakor (ed.), *Prosperity Gospel: A Biblical-Theological Evaluation* (Accra: Advent Press, 2020).

²⁶ Moses K. Asamoah, “Penteco/charismatic World View of Prosperity Theology”, *African Education Research Journal* 1: 3, 2013.

²⁷ Constantin Mwikama and Stephen A. Ifedha, “Blessed Are the Rich and Prosperous for Theirs Is the Kingdom of the World: The Kenyan Challenge”, *Research on Humanities and Social Science*, 5:14, 2015, hlm. 138.

orang itu.²⁸ Sembari merujuk pada Injil Lukas 6:38, Ora Roberts (bapak teologi kemakmuran) melukiskan bahwa bila orang Kristen mendambakan sesuatu, dia harus terlebih dahulu menabur. Jika yang didambakan adalah kasih, maka dia harus menabur kasih. Bila yang didambakan adalah waktu, maka waktulah yang harus ditabur. Bila yang didambakan adalah uang, maka uanglah yang harus ditabur.²⁹

Dalam perkembangannya, teologi kemakmuran lebih cenderung terfokus pada harapan akan imbalan berkat kekayaan material dari pada aktivitas spiritual seperti penyembuhan dalam iman. Uang dan kekayaan material menjadi simbol utama dari berkat ilahi.³⁰ Tak jarang para pewarta injil kesuksesan, termasuk Roberts sendiri, mengajarkan bahwa uang dan kekayaan material yang didonasikan kepada organisasi keagamaan yang mereka pimpin adalah benih-benih berkat kemakmuran material dari Allah. Dan bahwa Allah sendiri telah berjanji untuk melipatgandakan apa yang sudah didonasikan itu agar bisa dikembalikan kepada para pemberi donasi.³¹ Sehingga prioritas utama gerakan mereka lebih mengarah kepada promosi penumpukan modal yang dapat mengubah status kehidupan ekonomis seseorang dari miskin menjadi kaya raya.

Mengingat bahwa kehidupan dalam kelimpahan kekayaan material ini menjadi bukti nyata keberimanan dan keterberkatan seseorang, amat sering para pemimpin injil kemakmuran memperlihatkan cara hidup mewah di hadapan para pengikutnya. Hal itu ditujukan sebagai bukti bahwa apa yang mereka wartakan itu benar, karena sedang terjadi pada diri mereka. Nwaomah, dalam observasinya terhadap menjamurnya injil kemakmuran di Afrika, menulis, “The preacher of Prosperity Gospel are themselves the living examples of their messages of divine prosperity...Their lavish lifestyle reminds their followers of the power of faith that lays claim to hidden spiritual realities and translates them into material realities.”³² Para pewarta injil kemakmuran sering berkata bahwa sesungguhnya mereka menjadi kaya dan hidup dalam kemewahan karena benih-benih donasi yang sudah mereka taburkan. Para pengikutnya harus berbuat yang sama, walau harus berutang sekalipun, agar bisa mencapai kemewahan serupa.³³

Sebaliknya, penganut teologi kemakmuran juga percaya bahwa orang yang tidak menerima rahmat kekayaan material adalah orang yang lemah keberimanannya. Karenanya, kemiskinan dipahami sebagai simbol kehidupan tanpa berkat dan hal itu merupakan buah dari karya setan di dunia ini.³⁴ Sehingga, bagi penganut teologi kemakmuran, orang Kristen sejati tidak boleh berada dalam kondisi kemiskinan secara material karena hal itu bertentangan dengan rencana Allah yang sudah melengkapi dunia dengan kekayaan dan kemenangan bagi umatnya.

Walaupun demikian, kejatuhan ke dalam dosa menyebabkan manusia kehilangan haknya atas kesuksesan karena semua itu telah jatuh ke tangan setan. Kedatangan Kristus ke dunia ini sebenarnya untuk memulihkan kembali hak-hak legal umat manusia atas kekayaan dan kesuksesan.³⁵ Dalam

²⁸ Sampson M. Nwaomah, “Overview of Prosperity Gospel” in Daniel K. Bediakor (ed.), *Prosperity Gospel: A Biblical-Theological Evaluation* (Accra: Advent Press, 2020), hlm. 3-4.

²⁹ Ibid., hlm. 7.

³⁰ Cornelius J. P. Niemandt, “The Prosperity Gospel, the Decolonialization of Theology, and the Abduction of Missionary Imagination”, *Missionalia* 45: 3, 2017, hlm. 206.

³¹ Erik Z. M. Gbote and Selaelo T. Kgalta, “Prosperity Gospel: A Missiological Assessment”, *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 70: 1, 2014, hlm. 10 (f.n. 2).

³² Simpson M. Nwaomah, “Overview of Prosperity Gospel”, hlm. 10.

³³ Ibid.

³⁴ Isaac Phiri and Joe Maxwell, “Gospel of Riches: Africa’s Rapid Embrace of Prosperity Gospel Offers Concern – and Hope”, *Christianity today*, 51: 7, 2007, hlm. 23.

³⁵ Daniel K. Bediakor, *Prosperity Gospel*, hlm. 4.

konteks ini, penganut telogi kemakmuran berpandangan bahwa kekayaan material hakikatnya adalah bagian dari hak ilahi yang secara otomatis dimiliki oleh setiap orang Kristen yang percaya dan taat pada ajaran kitab suci. Hak ini bisa dipulihkan kembali lewat iman sebagai bagian dari paket keselamatan, mengingat karya penebusan Kristus tidak hanya mencakupi aspek penebusan dosa, tetapi juga penghapusan segala bentuk kemiskinan material.³⁶

Bersamaan dengan kian menjamurnya kelompok Kristen yang menjalankan aktivitas keagamaan versi teologi kemakmuran ini, muncul pula berbagai kritikan atas cara berteologi yang secara sempit memahami keberimanan dan karya keselamatan ilahi sebatas ada tidaknya kekayaan material. Keberimanan dan karya keselamatan Allah secara sangat gampang diperlakukan sebagai suatu komoditi yang dipasarkan ke konsumen, bukan sebagai suatu karya keselamatan yang seharusnya membuahkan pembebasan yang sesungguhnya bagi para penderita dan pertobatan yang nyata bagi para pendosa.³⁷ Tradisi pandangan yang menyakini suatu proses pemenuhan diri lewat penyerahan dan pengorbanan diri bagi Allah dan sesama sepertinya diganti dengan keyakinan bahwa manusia bisa mengkondisikan berkat ilahi dalam konteks kemakmuran material lewat kekuatan pikiran dan harapan manusia sendiri dengan membuat kalkulasi keuntungan material dalam pemberian donasi.³⁸

Di daerah atau negara maju di mana para pengikutnya tidak mengalami kesulitan finansial, ajaran seperti ini mungkin saja tidak mempunyai efek buruk yang sangat serius dalam kehidupan para penganutnya. Tapi di daerah dan negara miskin, seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, model keyakinan teologis seperti itu tidak hanya melegitimasi realitas kemiskinan dan penderitaan yang sudah ada dalam masyarakat, tapi juga bisa menciptakan penderitaan dan kemiskinan baru di antara para pengikutnya. Di Kenya dan beberapa negara di Afrika, misalnya, Mwikama dan Ifedha menemukan bahwa kegiatan keberimanan dalam semangat teologi kemakmuran cenderung mengarah kepada proses pemiskinan para penganutnya, sementara para pemimpin umat terus menikmati kehidupan dalam kemewahan. Mengikuti ajakan para pemimpin dan pengkotbahnya, anggota yang percaya pada pandangan teologi kemakmuran ini berusaha memberi dengan tulus sedemikian banyak dari yang mereka miliki dengan harapan akan mendapatkan ganjaran kekayaan material berlipat ganda. Tetapi harapan yang tidak terpenuhi justru menjerumuskan para pengikutnya ke dalam kondisi keputusasaan dan penderitaan, bahkan ada yang memutuskan untuk bunuh diri.³⁹

Bahwa teologi kemakmuran begitu gampang mengidentikkan berkat ilahi dengan kekayaan material, hal itu karena secara hermeneutik juga bermasalah. Simpson, misalnya, menyoroti empat masalah hermeneutika dari teologi kemakmuran. *Pertama*, adanya bias ideologis yang cenderung memaksakan pembenaran adanya ajaran teologi kemakmuran dari Kitab Suci. Pola pengutipan ayat-ayat Kitab Suci dibuat sedemikian rupa agar cocok dengan jalan pintas untuk mencapai berkat lewat kekayaan material yang hendak mereka wartakan. Dambaan untuk kaya raya dipaksakan sebagai pemahaman tentang ajaran ilahi dalam Kitab Suci. *Kedua*, adanya kecenderungan untuk menggunakan ajaran Kitab Suci secara utilitarianistik di mana ajaran suci direduksi sebatas kontrak kesuksesan dan keuntungan material. *Ketiga*, penekanan pada pewahyuan subyektif yang dialami oleh sang pemimpin dan pengkotbah sebagai pengetahuan tertinggi yang bersifat inklusif dan diterima langsung dari Allah,

³⁶ Stephen Hunt, ““Winning Ways”: Globalisation and the Impact of the Health and Wealth Gospel”, *Journal of Contemporary Religion*, 15: 3, 2000, hlm. 332-333.

³⁷ Michael S. Horton, *The Agony of Deceit* (Chicago, IL: Moody Press, 1990), hlm. 28.

³⁸ William M. R. Simpson, “The Significance of Andrew Perriman’s Faith, Health and Prosperity in the Word of Faith Debate”, *Journal of Pentecostal Theology* 16:1, 2007, hlm. 73.

³⁹ Constantin Mwikama and Stephen A. Ifedha, “Blessed Are the Rich”, hlm. 138-9.

dan tidak boleh menjadi obyek telaah ilmiah membuat berbagai tafsiran ajaran suci sulit diverifikasi dan diuji kebenarannya. *Keempat*, penafsiran atas ayat-ayat suci menjadi sangat dangkal karena mengabaikan struktur, sejarah dan konteks dari ayat-ayat itu.⁴⁰

Sebagai akibat dari masalah hermenutik semacam ini, sebagian pemimpin dan pewarta injil kemakmuran malah mengadopsi pendekatan ekonomi neoliberal kapitalis yang hanya fokus pada keuntungan material sembari mengabaikan berbagai tanggung jawab moral, social dan spiritual. Mereka beranggapan bahwa yang kuat bisa menggunakan yang lemah demi keuntungan yang dikejarinya, sementara yang bijak bisa memperdaya yang bodoh demi kemakmuran dirinya.⁴¹ Bahwa kelompok Kristen Evangelis sangat kuat mendukung, malah secara khusus mendoakan dan memberkati mantan Presiden Donald Trump, walaupun berbagai penipuan publik dan ketidakadilan yang sengaja dibuat demi kepentingan pribadinya selama berkuasa, memperlihatkan kontroversi dari teologi model ini.⁴² Dalam kenyataan, yang dipromosikan dari pandangan teologis semacam ini justru ketidakadilan dan ketidakbenaran hanya demi kekayaan material semata. Pada taraf tertentu teologi model ini justru menjadi daya yang menggerakkan kegiatan keagamaan sebagai sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan material. Karena itu, diperlukan model berteologi yang benar di mana: 1) penderitaan karena ketidakadilan dan kemiskinan ditanggulangi secara merata, 2) HAM setiap manusia dihormati dan dilindungi, dan 3) aktivitas bisnis menjadi medium perwujudan rencana penyelamatan ilahi di dunia ini. Model teologi seperti ini diperlukan untuk memaknakan kembali: 1) mandat penciptaan berkelanjutan yang diserahkan Allah kepada manusia (mahluk pengemban citra-Nya) untuk menaklukkan dan menguasai semesta yang tercipta baik adanya (Kej 1:26, 28), dan 2) panggilan untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan manusia dan dunia yang terluka dosa.

Bisnis, Korporasi dan Mandat Penciptaan-Penyelamatan

Jika secara umum tujuan utama aktivitas bisnis adalah pengakumulasian keuntungan komersial, maka dalam konteks mandat penciptaan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Kitab Kejadian, aktivitas bisnis dan keuntungan itu harus dipahami dalam bingkai tujuan penciptaan semesta dan manusia. Itu berarti aktivitas bisnis sebagaimana semua aktivitas lainnya harus dipahami sebagai mandat untuk terus berkerja bersama Allah dalam menyempurnakan dunia dan manusia. Untuk itu, tujuan aktivitas bisnis perlu disesuaikan dengan tujuan penciptaan oleh Allah, yakni kepenuhan martabat manusia dan keutuhan ciptaan. Sementara itu tujuan korporasi sebagai institusi perlu dimaknakan sebagai pengemban mandat dan partner Allah dalam karya penciptaan dan penyelamatan yang berkelanjutan.⁴³

Kisah penciptaan semesta sebagaimana dirangkum dalam Kitab Kejadian Bab 1-2 menggambarkan Allah sebagai figur pekerja yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Kerja adalah bagian utama dari kodrat ilahi. Lewat mandat penciptaan yang diberikan kepada manusia, Allah menjadikan kerja sebagai bagian dari kodrat manusia juga. Lewat kerja ini manusia mewujudkan kepenuhan martabatnya.⁴⁴ Sebagaimana dengan tepat dilukiskan oleh Yohanes Paulus II, kerja hakikatnya baik bagi manusia dan baik bagi kemanusiaannya, karena melalui kerja, manusia

⁴⁰ William m. R. Simpson, "The Significance of Andrew Perriman's Faith, hlm. 75-79.

⁴¹ Simpson M. Nwaomah, "Overview of Prosperity Gospel," hlm. 14.

⁴² Brenden Clarey, "Trump and the 'prosperity gospel' sell false promises to credulous evangelical Christians," *USA Today*, 9 January 2020.

⁴³ Denise Daniels, "Toward A Theology of Business", in Bartholomew C. Okonkwo (ed.), *Finding Meaning in Business: Theology, Ethics and Vocation* (New York: Palgrave Macmillan, 2012), hlm. 61.

⁴⁴ John A. Perricone, "Catholic Theology of Work and Worship", *St. John's Law Review*, 73: 3, hlm. 823.

membaharui dunia demi mencapai pemenuhan diri selaku manusia, dan dalam arti tertentu agar menjadi "lebih manusiawi".⁴⁵ Untuk itu, Allah menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya sendiri (Kej 1:26-27) dan memerintahkan manusia untuk tidak hanya menguasai (Kej 1:26, 28:), tapi juga menjaga (Kej 2:15) dan mengusahakan kelestarian bumi (Kej 1:28; 2:19-20). Dalam konteks ini, aktivitas bisnis sebagai rutinitas kerja dalam keseharian setiap manusia bukan hanya sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia atau mengakumulasi keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan mandat penciptaan ini.⁴⁶

Aktivitas kerja oleh Allah di dunia ini terus berlanjut lewat rutinitas kerja sehari-hari oleh setiap manusia. Kenyataan bahwa "Sabda" (kekuatan ilahi yang memungkinkan realitas penciptaan dari tidak ada menjadi ada) menjadi manusia dalam diri Yesus yang masuk ke dunia (misteri inkarnasi) menyingkapkan keberlanjutan aktivitas kerja Allah dalam menyempurnakan dunia dan manusia.⁴⁷ Kedatangan, kematian dan kebangkitan Yesus di dunia ini mengkonfirmasi kebenaran dari aktivitas kerja Allah yang terus berlanjut di dunia ini. Yesus pun membenarkan hal itu ketika berkata: "Bapak-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga" (Yoh 5:17). Lewat Yesus yang menjadi manusia dan melakukan aktivitas kerja Allah di dunia ini, rutinitas kerja setiap hari menjadi corak utama setiap manusia sebagai pengemban citra Allah. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa dengan menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya dan menempatkannya dalam dunia yang kelihatan ini untuk menguasai dan mengusahakannya, Allah sejak semula sebenarnya sudah memanggil manusia untuk bekerja bersama-Nya.⁴⁸ Karenanya, sebagaimana produk kerja Allah adalah semesta dan segala isinya yang baik adanya, dan semuanya diarahkan kepada penyempurnaan lewat karya peyelamatan oleh Kristus, produk kerja manusia juga harus mencerminkan produk kerja Allah, dan semuanya harus diarahkan kepada kemuliaan Allah dalam wujud kepeenuhan martabat manusia dan keutuhan alam.

Demi tujuan yang mulia ini, pemberian mandat penciptaan oleh Allah kepada manusia disertai dengan batasan dalam menggunakan kebebasan yang dimiliki: boleh makan buah apa saja dari pepohonan di taman, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat (Kej 2:16-17). Walaupun manusia diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan mandat penciptaan, hal itu perlu dilakukan tanpa mencederai martabat citra Allah dalam diri sendiri dan sesamanya. Sebagaimana diingatkan oleh Yohanes Paulus II, ketika orang tidak menyadari keluhuran nilai kemanusiaan dalam dirinya dan diri orang lain, orang itu kemungkinan akan menggunakan kemanusiawian sesamanya demi keuntungan dirinya dan dengan itu menjauhkan diri dari solidaritas dan persatuan dengan sesamanya.⁴⁹ Kesadaran ini sangat penting dalam memaknakan aktivitas kerja bisnis sebagai perwujudan nyata dari mandat penciptaan, di mana pelaku bisnis sebagai individu dan organisasi menjadi kolaborator yang paling mampu dan produktif dalam mengimplementasikan karya kreatif Allah demi menyempurnakan dunia dan manusia karena kemampuan finansial, managerial dan teknis yang dimilikinya.

Walaupun setiap manusia sebagai pribadi menerima mandat penciptaan untuk bersama Allah menyempurnakan diri dan dunia, manusia sebagai individu tidak melakukannya sendirian. Untuk

⁴⁵ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, AAS 73 (1981), para. 9.

⁴⁶ Ibid., hlm. 1, Ucapan berkat pembukaan.

⁴⁷ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompedium Ajaran Sosial Gereja*, Dipersembahkan kepada Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II, Guru Ajaran Sosial serta Penyaksi Keadilan dan Perdamaian, Vatikan, 2 April 2004, para. 327.

⁴⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, Ucapan berkat pembukaan.

⁴⁹ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Centesimus Annus*, para. 41.

berbagai kegiatan membangun dunia ini, perlu kerjasama dengan manusia lainnya. Hal ini juga bisa dikatakan tentang perwujudan mandat penciptaan lewat bisnis sebagai wadah atau organisasi yang memerlukan jaringan kerjasama yang kompleks dan menuntut profesionalitas. Justru untuk kerjasama semacam ini, Allah tidak menciptakan satu orang saja untuk menguasai dan mengusahakan dunia ini. “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kej 2:18). Allah menciptakan manusia sebagai sebuah komunitas, organisasi atau institusi sosial untuk berbagai bentuk kerjasama, termasuk untuk kerjasama bisnis (produksi dan distribusi barang dan jasa) dalam bentuk korporasi.⁵⁰ Karenanya, korporasi (sama seperti semua organisasi lainnya, seperti IMF dan Bank Dunia) adalah bagian penting dari rencana ilahi yang sejak awal penciptaan telah dirancang oleh Allah agar manusia melakukan berbagai karya produktif yang terorganisir demi mewujudkan mandat penciptaan secara bersama-sama demi kebaikan bersama.

Dalam konteks mandat penciptaan ini, bisnis mempunyai tujuan yang jauh lebih mulia dari hanya sekadar mengakumulasi keuntungan material semata. Bisnis seharusnya menjadi aktivitas produktif dalam membangun Kerajaan Allah – yakni kondisi di mana kemuliaan Allah menjadi nyata dalam kepenuhan martabat manusia dan keutuhan ciptaan. Untuk tujuan ini, bisnis sebagai perwujudan mandat penciptaan harus 1) memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa berdasarkan patokan nilai kebenaran dan keadilan demi menciptakan kemakmuran bersama; 2) memungkinkan semua yang terlibat dalam aktivitas bisnis, khususnya majikan dan karyawan, untuk memaksimalkan berbagai kemampuan yang dimiliki agar secara penuh memaknakan mandat penciptaan Allah; 3) menjadi institusi yang memungkinkan kerjasama antara manusia sebagai bentuk nyata kolaborasi dalam karya penciptaan Allah; dan 4) menggunakan sumber daya dan kekayaan alam dengan cara yang menjunjung tinggi martabat manusia dan memperkokoh keutuhan ciptaan.⁵¹

Tujuan mulia ini terabaikan bila manusia menjadikan dirinya sebagai pemilik mandat penciptaan, bukan pengemban mandat penciptaan. Inilah realitas dosa di mana manusia lebih mementingkan mandat diri atau menyalahgunakan mandat penciptaan sembari mengabaikan nilai-nilai keilahian yang melekat dalam dirinya sebagai citra Allah. Sebagai imbalan untuk keangkuhan manusia ini, kerja sebagai mandat penciptaan menjadi tanggung jawab yang harus diwujudkan dengan susah payah: “dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu (Kej 3:17,19).⁵² Tetapi keangkuhan membuat manusia memilih untuk menempuh cara gampang dalam mempertahankan kehidupannya dan memenuhi berbagai hasratnya. Sehingga kerja pribadi dan organisasi dalam aktivitas bisnis lebih diarahkan kepada kepentingan diri dan kelompok, sementara sesama dan berbagai sumber alam dieksploitasi demi kepentingan diri dan kelompok itu. Cara kerja bisnis mengikuti pola pikir, yang Noam Chomski (dalam kritiknya terhadap ekonomi neoliberal kapitalis) sebut sebagai “profit over people”.⁵³ Inilah akar utama masalah pemerkosaan HAM dalam aktivitas bisnis oleh korporasi.

Dengan menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip ekonomi neoliberal kapitalis semata, korporasi sebagai institusi menjadikan dirinya tujuan utama aktivitas bisnis. Hal ini menjadi nyata dalam doktrin yang menyempitkan tujuan bisnis hanya sebagai usaha mengakumulasi keuntungan bagi pemilik saham perusahaan. Demi tujuan itu, amat sering sistem (hukum, norma), kekuasaan

⁵⁰ Denise Daniels, “Toward A Theology of Business”, hlm. 62.

⁵¹ Ibid., hlm. 63.

⁵² Evelyn E. Whitehead and James D. Whitehead, “Making A Living, Making A Life: Toward A Spirituality of Work”, *New Theology Review*, 11: 3, 1998, hlm. 5-13.

⁵³ Noam chosmsky, *Profit Over people: Neoliberalism and Global Order* (New York: Seven Stories Press, 1999).

(pengaruh) dan keuntungan finansial (keuangan) disalahgunakan dan dikorupsi. Karenanya benar observasi sebagian pengamat, bahwa keberhasilan luar biasa dari sistem ekonomi neoliberal kapitalis (pasar bebas, deregulasi dan minimnya kontrol pemerintah atas aktivitas bisnis) dalam menciptakan kekayaan yang sangat besar bagi pelaku bisnis (korporasi) terjadi karena semua itu dilakukan secara efektif dan efisien lewat sistem dan struktur sosial yang immoral dan tak adil.⁵⁴

Tanpa tatanan hukum yang adil dan absennya kontrol yang memadai dari pemerintah, tawar-menawar kepentingan dalam persaingan pasar bebas tentu akan didominasi oleh kepentingan pelaku bisnis dan korporasi. Rasa kepemilikan atas mandat penciptaan menjadikan bisnis sebagai kekuatan eksploitatif demi keuntungan material yang sebesar-besarnya, termasuk dengan cara-cara yang memperkosa HAM dan merusak lingkungan. Terus menguatnya tuntutan akan tanggung jawab sosial dan akuntabilitas korporasi dalam aktivitas bisnis, misalnya karena pengeksploitasian pekerja anak di bawah umur, pembekuan serikat perkerja di perusahaan, perampasan tanah warga dan pengrusakan lingkungan demi pertambangan, adalah contoh paling nyata dari penyalahgunaan mandat penciptaan dan absennya nilai-nilai kerajaan Allah dalam aktivitas bisnis.

Walaupun dalam praktek, dosa personal dan sosial memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengaplikasian mandat penciptaan, hal itu sama sekali tidak menghapus corak asli mandat penciptaan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pribadi dan organisasi.⁵⁵ Yang pasti, penyimpangan dalam pelaksanaan mandat penciptaan, termasuk lewat pemerkosaan HAM dalam aktivitas bisnis, menyertakan penderitaan dan kesakitan (kematian) bagi manusia. Justru realitas kesakitan dan penderitaan karena pemerkosaan HAM dalam aktivitas bisnis semacam ini menuntut suatu proses pembebasan dan penyelamatan yang nyata. Itu berarti, di tengah realitas penderitaan sekali pun martabat manusia dan keutuhan ciptaan harus terus diperbaharui dan disempurnakan demi mewujudkan kondisi penyelamatan yang nyata di dunia ini.

Karenanya, diperlukan tapak pembaharuan lewat pertobatan pribadi dan struktural untuk kembali meluruskan makna, tujuan dan cara kerja pribadi dan kerja sama organisasi dalam aktivitas bisnis sebagaimana diamatkan dalam mandat penciptaan. Jalan pertobatan pribadi dan struktural menuju kondisi penyelamatan dan pembebasan yang nyata ini sudah disediakan dan dimulai oleh Allah sendiri dalam misteri salib, kebangkitan dan pengutusan Roh Kudus.⁵⁶ Sebagai bagian dari ciptaan ilahi dalam dunia yang tidak sempurna, setiap pengemban mandat penciptaan entah sebagai pribadi atau organisasi dipanggil untuk terus menyempurnakan diri lewat pertobatan personal dan struktural, dan dengan itu berkontribusi pada penyempurnaan seluruh semesta. Pertobatan semacam ini harus menjadi kesadaran dan komitmen keberimanan untuk berkontribusi pada karya penyelamatan yang nyata di tengah meluasnya aktivitas bisnis yang cenderung mengakumulasi untung di atas jeritan penderitaan para korban HAM.

Fundasi nilai bagi jalan menuju pertobatan ini diperlihatkan kepada dunia lewat peristiwa Salib. Salib dalam ketragisannya di mata dunia hakikatnya menyingkapkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti nilai kebenaran, keadilan, persaudaraan, solidaritas, pengorbanan dan pemberian diri.⁵⁷ Inilah

⁵⁴ Craig Gay, "On Learning to Live with the Market Economy," *Christian Scholars Review*, 24: 2, 1996, hlm. 180-195.

⁵⁵ Miroslav Volf, *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work* (Oxford: Oxford University Press, 1991).

⁵⁶ Denise Daniels, "Toward A Theology of Business," hlm. 65.

⁵⁷ Henk J. M. Schoot, "Divine transcendence and the mystery of salvation according to Thomas Aquinas", in Harm. J. M. J. Goris, et.al (Eds.), *Divine Transcendence and Immanence in the Work of Thomas Aquinas* (Utrecht: Peeters Publishers, 2009), hlm. 7(online)

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/13893210/DIVINE_TRANSCENDENCE_AND_THE_MYSTERY_OF_SALVATION_ACCORDING_TO_THOMAS_AQUINAS.pdf

fundasi nilai yang seharusnya menjadi kekuatan transformatif untuk memaknakan mandat penciptaan dan jalan pertobatan dalam aktivitas bisnis. Tanpa fondasi nilai semacam ini, demi hasrat mengejar keuntungan bisnis, kebenaran akan diganti oleh manipulasi harga dan peluang. Keadilan diganti oleh diskriminasi dan perampasan. Pengorbanan dan pelayanan diganti oleh pemerasan. Pandangan para pelopor ekonomi neoliberal kapitalis dan sebagian korporasi bahwa tidak ada tanggung jawab sosial korporasi selain mengakumulasi keuntungan bagi para pemilik saham hakikatnya justru menegasi fondasi nilai-nilai kerajaan Allah ini dalam aktivitas bisnis.

Sebaliknya komitmen untuk memaknakan aktivitas bisnis sebagai pengimplementasian mandat penciptaan meniscayakan tanggung jawab sosial dan spiritual untuk melakukan aktivitas bisnis yang menyertai keuntungan personal dan komunal itu sebagai pelayanan yang memuliakan Pencipta, memanusia-manusia dan melestarikan lingkungan. Dalam hal ini, keuntungan bisnis bukanlah semata-mata harta milik pribadi sebagaimana dipahami dalam konteks hukum hak kepemilikan, tetapi juga sebagai berkat dan hadiah ilahi untuk didistribusikan agar memenuhi kebutuhan bersama umat manusia pada generasi sekarang dan mendatang.⁵⁸ Menyadari pentingnya fungsi sosial dan spiritual dari harta milik ini, Yohanes Paulus II mengajak pelaku bisnis untuk “memperluas pemahaman dan pengelolaan harta milik pribadi sesuai dengan fungsi sosialnya yang sangat diperlukan untuk memajukan kebaikan bersama, khususnya kebaikan anggota masyarakat yang paling lemah.”⁵⁹ Karena itu, dalam konteks mandat penciptaan dan penyelamatan, makna dan tujuan bisnis sangat ditentukan oleh komitmen pelaku bisnis sebagai komunitas orang-orang (*community of persons*) untuk menciptakan keseimbangan antara target keuntungan bisnis dan tanggung jawabnya untuk melayani kebaikan bersama lewat kegiatannya inovatif dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa bagi umat manusia.⁶⁰

Penutup

Walaupun ada pandangan umum yang terkesan memisahkan pemahaman tentang bisnis dan teologi, atau keuntungan material dan pelayanan terhadap kebaikan bersama, tujuan aktivitas bisnis akan bisa dipahami secara komprehensif bila ditempatkan dalam konteks pemahaman yang benar tentang kodrat manusia sebagai citra Allah dan agen pengemban mandat penciptaan. Kedua aspek teologis ini memberi fondasi makna bagi tujuan terdalam aktivitas bisnis sebagai bentuk nyata kerja Allah yang terus diwujudkan di dunia ini lewat kerja manusia dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, tujuan bisnis tidak hanya mencakup aspek ekonomis, tetapi juga aspek komunal dan relational (sosial dan spiritual). Demikian juga, korporasi bukan hanya badan usaha untuk mengakumulasi keuntungan ekonomis lewat penjualan barang dan jasa, tetapi juga komunitas orang-orang (komunitas solidaritas) untuk memuliakan Allah dalam pelayanan nyata kepada masyarakat dan pelestarian alam lewat berbagai keunggulan inovatif, *know-how* dan teknologi yang dimilikinya. Tanpa pemahaman yang komprehensif seperti ini tujuan bisnis bisa dipersempit hanya sebatas sarana pengakumulasian keuntungan ekonomis sebagaimana dipromosikan dalam doktrin ekonomi neoliberal, apapun caranya, termasuk dengan memperkosa HAM dan merusak alam. Makna keuntungan bisnis pun bisa

⁵⁸ Yohanes Paulus II, Ensiklik *Laborem Exercens*, para. 13, Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, para. 329.

⁵⁹ Message of His Holiness Pope John Paul II for the Celebration of the World Day of Peace, 1 January 2000, Vatican, 8 December 1999.

⁶⁰ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, para. 338-340.

disalahgunakan untuk membenarkan interpretasi teologis dan praktek keberimanan yang justru melegitimasi ketidakadilan dan pemerkosaan HAM sebagaimana dihidupkan oleh penganut teologi kemakmuran.

Usaha transformatif dalam menjawab jeritan penderitaan mereka yang martabat dan HAMnya terlukai dan terus terancam karena aktivitas bisnis, akan membuahkan realitas pembebasan yang nyata bila pemahaman komprehensif ini menjadi dasar kesadaran keberimanan yang bisa dihidupkan dalam aktivitas bisnis. Dengan fundasi kesadaran keberimanan yang demikian, berbagai norma dan kesepakatan moral dan legal dalam berbisnis juga akan ditaati bukan hanya sebatas kesepakatan politis cuma demi menghindari akuntabilitas semata, tetapi lebih sebagai komitmen individu dan kumpulan manusia pengemban citra Allah untuk mengimplementasikan mandat penciptaan demi menyempurnakan manusia dan dunia. Pelaku bisnis dan korporasi pun akan menjadi kolaborator Allah dan aktivitas bisnis yang dilakukannya akan menjadi partisipasi dalam pemenuhan karya penyelamatan Allah dalam mewujudkan pembebasan yang nyata bagi mereka yang HAM dan martabatnya terlukai dan terancam.

Daftar Rujukan

- Asamoah, Moses, K. "Penteco/charismatic World View of Prosperity Theology". *African Education Research Journal*, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Beder, Sharon. *Suiting Themselves: How Corporations Drive Global Agenda*. London: Earthscan, 2006.
- Bediakor, Daniel. K. (ed.). *Prosperity Gospel: A Biblical-Theological Evaluation*. Accra: Advent Press, 2020.
- Charreaux, Gerald and Desbrières, Philippe. "Corporate Governance: Stakeholder Value Versus Shareholder Value". *Journal of Management & Governance*, Vol. 5, No. 2, 2001.
- Clarey, Brenden. "Trump and the 'prosperity gospel' sell false promises to credulous evangelical Christians". *USA Today*, 9 January 2020.
- Chosmsky, Noam. *Profit Over people: Neoliberalism and Global Order*. New York: Seven Stories Press, 1999.
- Daniels, Denise. "Toward A Theology of Business", in Okonkwo, Bartholomew. C. (ed.), *Finding Meaning in Business: Theology, Ethics and Vocation*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Easterly, William. "IMF and World Bank Structural Adjustment Programs and Poverty", in Michael P. Dooley and Jeffrey A. Frankel (eds.), *Managing Currency Crisis in Emerging Markets*. Chicago: Chicago University Press, 2003.
- Friedman, Milton. "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits". *New York Times Magazine*, September 13, 1970.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Men*. New York: Free Press, 2006.
- Gay, Craig. "On Learning to Live with the Market Economy". *Christian Scholars Review*, Vol. 24, No. 2, 1996.

- Gbote, Eric. Z. M. and Kgalta, Selaelo T. "Prosperity Gospel: A Missiological Assessment". *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*. Vol. 70, No. 1, 2014.
- Harm. J. M. J. Goris, et.al (Eds.), *Divine Transcendence and Immanence in the Work of Thomas Aquinas*. Utrecht: Peeters Publishers, 2009.
- Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework, *UN. Doc A/HRC/17/31* (21 March 2011).
- Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Horton, Michael, S. *The Agony of Deceit*. Chicago, IL: Moody Press, 1990.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompedium Ajaran Sosial Gereja*, Dipersampaikan kepada Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II, Guru Ajaran Sosial serta Penyaksi Keadilan dan Perdamaian, Vatikan, 2 April 2004.
- Kotz, David. M. "The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism". *Review of Radical Political Economics*, Vol. 41, No. 3, 2009.
-*The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
- Hunt, Stephen. "Winning Ways": Globalisation and the Impact of the Health and Wealth Gospel". *Journal of Contemporary Religion*, Vol. 15, No. 3, 2000.
- Mere, Winibaldus, S. "Socio-Spiritual Aspect of Business". *The Japan Mission Journal*, Vol. 75, No. 2, 2019.
- "Recent Trend Toward a Balanced-Business and Human Rights Responsibility in Investment Treaties and Arbitrations," *International Journal on Human Rights and Business*, Vo.4, No.2, 2020, pp. 1-16.
- Muchlinski, Peter. *Multinational Enterprises and the Law Second Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- "Implementing the New UN Corporate Human Rights Framework: Implications for Corporate Law, Governance and Regulation". *Business Ethic Quarterly*, Vol. 22, No.1, 2012.
- Mwikama, Constantine and Ifedha, Stephen, A. "Blessed Are the Rich and Prosperous for Theirs Isthe Kingdom of the World: The Kenyan Challenge". *Research on Humanities and Social Science*, Vol. 5, No 4., 2015.
- Niemandt, Cornelius J. P. "The Prosperity Gospel, the Decolonialization of Theology, and the Abduction of Missionary Imagination". *Missionalia*, Vol. 45, No. 3, 2017.
- Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, *UN. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev. 2* (13 August 2003).
- Nowak, Manfred. *Human Rights or Global Capitalism: The Limits of Privatization*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017.
- Perricone, John. A. "Catholic theology of Work and Worship". *St. John's Law Review*, Vol. 73, No. 3, 1999.

- Phiri, Isaac and Maxwell, Joe. "Gospel of Riches: Africa's Rapid Embrace of Prosperity Gospel Offers Concern – and Hope". *Christianity Today*, Vol. 51, No. 7, 2007
- Simpson, William M. R. "The Significance of Andrew Perriman's Faith, Health and Prosperity in the Word of Faith Debate". *Journal of Pentecostal Theology*, Vol. 16, No. 1, 2007.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and Its Discontent*. London: Penguin, 2002.
- The Structural Adjustment Participatory Review International Network. *The Policy Roots of Economic Crisis and Poverty*. Washington DC: SAPRIN, 2002.
- Walsh, Brian J. and Middleton, Rinchar J. *The Transforming Vision: shaping a Christian Worlview*. Illinois: Intervarsity Press, 1984.
- Whitehead, Evelyn. E. and Whitehead, James. D. "Making A Living, Making A Life: Toward A Spirituality of Work". *New Theology Review*, Vol. 11, No. 3, 1998.
- Paulus II, Yohanes. Ensiklik *Laborem Exercens*, AAS 73 (1981).
- Paulus II, Yohanes. Ensiklik *Centesimus Annus*, AAS 83 (1991).
- Volf, Miroslav. *Work in the Spirit: Toward a Theology of Work*. Oxford: Oxford University Press, 1990.